

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abraham H. Maslow, 1970, *"Motivation and Personality"*, Harper & Row Publishers, New York
- Asmin, 1986, *"Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, PT. Dian Rakyat, Jakarta
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *"Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW"*, Hidakarya Agung, Jakarta
- Departemen Agama RI, 1984, *"Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)"*, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta
- Herimanto dan Winarno, 2012, *"ilmu Sosial & Budaya Dasar"*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Hendro Setiawan, 2014, *"Manusia Utuh, Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow"*, PT. Kanisus, Yogyakarta
- Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Banyumedia Publishing, Malang
- Mahmud Syalthut Ali As-sayis, 2000, *"Fiqih Tujuh Madzhab"*, Tjm. Muqaranatul Madzahib Fil Fiqhi, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung
- Muhammad Syaifuddin, 2013, *"Hukum Perceraian"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"*, Cetakan ke 12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- R. Subekti, 1985, *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*, Intermasa, Jakarta
- Sayuti Thalib, 1986, *"Hukum Kekeluargaan di Indonesia"*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Sumur, Bandung
- WJS. Poerwadarminta. 1986, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Cet. Ke-9, Balai Pustaka, Jakarta
- Yudian W. Aswin, 1995, "*Hukum Islam Di Indonesia*", Cet. 2, Pustaka Setia, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2006, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", cet. Ke-1, Media Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer , Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2291;
- Burgerlijk Wetboek (BW) /KUHPerdata;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.

Juklak atasan yang berhak menghukum (Ankum) perwira penyerah perkara (papera)

C. JURNAL

Aafiyah Rizka Maliki, “Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Karena Interfilitas”, Psikoborneo, No. 4, Vol. 7, 2019

Ahmad Zaenal Fanani, 2002, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, No. 2, Vol. 9, 2013

Erni Agustina, “Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009

Khazanah, “Jeremy Bentham”, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Vol. 2, 2015

Mohammad Yuhdi, “Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, LIKHITAPRAJNA, No. 1, Vol. 15, 2012

Muh Endriyo Susila, “Wacana Kriminalisasi Marital Rape Dalam Timbangan Hukum Islam dan Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, No. 1, Vol. 1, 2012

D. WEBSITE

Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, diakses May, 26 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.